THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL
https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index
P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

# KONFLIK GEOPOLITIK ANTARA IRAN DAN ARAB SAUDI SERTA PENGARUHNYA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK WARGA NEGARA

**Dinda Muthia Phasya*[1], Hani Aliya[2], Ovilia Azzahrah[3]**
[1,2,3]Universitas Sriwijaya, Indonesia
e-mail: ***[1]**dinda.phasya16@gmail.com, [2]hanialiya128@gmail.com, [3]oviliaazzahrah@gmail.com
**DOI:** 10.70656/tonji.v1i1.844

**Abstrak**

*The geopolitical rivalry between Iran and Saudi Arabia has long been a key factor contributing to instability in the Middle East. This competition is reflected in the struggle for regional influence, involvement in proxy wars, and the emergence of sectarian identity polarization across various countries in the region. This study aims to analyze the role of the state in ensuring the protection of citizens' fundamental rights amidst these regional conflict dynamics. This research is a legal study employing a normative method with conceptual and statutory approaches. Through these approaches, the research examines various legal principles, doctrines, and legal instruments related to state obligations in protecting human rights during geopolitical conflicts. The results indicate that the rivalry between Iran and Saudi Arabia has the potential to affect the fulfillment of citizens' rights, including economic, social, civil, and political rights. A shift in state policy priorities toward militaristic national security often results in a lack of attention to the fulfillment of basic community rights. Furthermore, political dynamics that exploit sectarian identities also have the potential to trigger discrimination against domestic minority groups. Consequently, this study concludes that protecting citizens in the midst of regional conflicts requires strengthening state commitment to human rights principles and policies that emphasize a human security approach. The state must place the protection of its citizens as a top priority to ensure the welfare and safety of the community amidst the ever-evolving dynamics of international politics*.

***Keywords: Saudi Arabia, Geopolitics, Citizens' Rights, Iran***

## PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika geopolitik yang kompleks dan sering kali menjadi pusat berbagai konflik regional. Konflik merupakan fenomena yang sering muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik dapat terjadi dalam skala besar maupun kecil, karena pada dasarnya berakar dari perbedaan kepentingan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kondisi tersebut kemudian dapat memunculkan persaingan yang berpotensi berkembang menjadi konflik ketika kepentingan antar kelompok tidak dapat diselaraskan.[1] Dalam beberapa dekade terakhir, rivalitas antara Iran dan Arab Saudi muncul sebagai flnsalah satu faktor penting yang memengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan tersebut. Kedua negara tersebut memiliki pengaruh besar di Timur Tengah dan berupaya memperluas kepentingan strategisnya melalui berbagai kebijakan politik, ekonomi, maupun keamanan. Persaingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perebutan pengaruh geopolitik, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan ideologi keagamaan antara mazhab Syiah yang menjadi identitas politik Iran dan mazhab Sunni yang dominan di Arab Saudi.

[1] Mohammad Khoiri Herlianto, "Peran Arab Saudi Dan Iran Pada Konflik Di Yaman Yang Menyebabkan Krisis Kemanusiaan Pada Tahun 2018" (Universitas Nasional, 2022).

Baik Arab Saudi maupun Iran sama-sama memiliki sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga unsur agama menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial maupun tata kelola negara. Meskipun demikian, bentuk sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kedua negara tersebut memiliki perbedaan yang cukup jelas. Arab Saudi menerapkan sistem monarki, di mana kekuasaan politik terpusat pada raja yang berasal dari keluarga Ibnu Saud. Sementara itu, Iran setelah Iranian Revolution di bawah kepemimpinan Ruhollah Khomeini mengadopsi sistem republik Islam yang memiliki karakter teokratis. Dalam sistem tersebut terdapat presiden sebagai kepala pemerintahan, namun otoritas tertinggi negara berada pada pemimpin spiritual yang dikenal melalui konsep Wilayat al-Faqih, yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.[2]

Dalam dinamika politik di kawasan Timur Tengah, perbedaan pemahaman keagamaan antara kelompok Sunni dan Syiah sering dikaitkan dengan persaingan dalam memperoleh kekuasaan serta penguasaan sumber daya. Dari sudut pandang historis, ketegangan antara Iran dan Arab Saudi mulai semakin terlihat sejak terjadinya Iranian Revolution pada tahun 1979 serta konflik bersenjata dalam Iran–Iraq War yang berlangsung pada 1980–1988. Revolusi tersebut menandai runtuhnya sistem monarki di Iran dan lahirnya Republik Islam, yang juga memperkuat dinamika perbedaan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah di kawasan tersebut.[3]

Seiring berkembangnya dinamika politik regional, rivalitas antara kedua negara tersebut tidak selalu berlangsung dalam bentuk konfrontasi militer secara langsung, melainkan melalui berbagai konflik tidak langsung atau perang proksi di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Negara-negara seperti Yaman, Suriah, Irak, dan Lebanon sering kali menjadi arena persaingan pengaruh antara kedua kekuatan regional tersebut. Kondisi ini menyebabkan konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik, keamanan, serta kondisi sosial masyarakat di negara-negara yang terdampak konflik. Dalam banyak kasus, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari konflik tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah sering dikaitkan dengan berbagai dinamika konflik. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup persoalan transnasional di bidang ekonomi, politik, serta ideologi. Salah satu rivalitas yang terus memengaruhi stabilitas kawasan adalah persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Kedua negara ini dipandang sebagai kekuatan penting di kawasan, dengan Arab Saudi yang merepresentasikan tradisi Islam Sunni dan Iran yang identik dengan Islam Syiah. Rivalitas tersebut semakin mengemuka setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924, yang mengubah peta kekuatan politik di kawasan.[4]

Hubungan antara Iran dan Arab Saudi juga semakin tegang setelah terjadinya *Arab Spring*. Ketidakstabilan politik di berbagai negara Arab dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memperluas pengaruh serta memperjuangkan kepentingan nasional mereka di kawasan. Dalam proses tersebut, keduanya terlibat dengan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di beberapa negara. Namun, posisi yang diambil oleh kedua negara sering kali berbeda. Arab Saudi cenderung mendukung pemerintah atau pihak yang mempertahankan tatanan politik yang ada, sedangkan Iran lebih sering memberikan dukungan kepada kelompok oposisi atau aktor non-negara yang menentang pemerintah. Rivalitas ini kemudian memperkuat persaingan pengaruh di kawasan Timur Tengah.[5]

---

[2] Khotibul Umam, "Rivalitas Arab Saudi, Iran, Dan Israel Di Kawasan Timur Tengah," *Populika* 10, no. 2 (2022): 1–10, https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509.

[3] Arsad Hidayat and Sabil Mokodenseho, "Dinamika Arab Sunni Dan Iran Syiah Di Era Kontemporer," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5256–69.

[4] Rizki Pratama Putra et al., "INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN UNTUK MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI TIMUR TENGAH," *Jurnal PIR* 4, no. 1 (2019): 76–99.

[5] Universitas Jenderal and Achmad Yani, "DAMPAK KETERLIBATAN IRAN DALAM PROXY WAR YAMAN MELALUI KELOMPOK HOUTHI TERHADAP INSTABILITAS REGIONAL PADA TAHUN 2015-2020," *Global Insight Journal* 02, no. 01 (2025).

Berdasarkan situasi kawasan yang diwarnai konflik di negara-negara sekitar serta dinamika regional setelah peristiwa A*rab Spring*, Arab Saudi menilai perlunya mengambil langkah yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas keamanan nasionalnya. Salah satu bentuk kebijakan tersebut tercermin dalam langkah politik luar negeri yang melibatkan keterlibatan militer di Yaman sebagai upaya mempertahankan pengaruh sekaligus menjaga keamanan kawasan yang dianggap strategis bagi kepentingannya.[6]

Dikenal juga konsep *Proxy War*, yang artinya merujuk pada konflik yang terjadi antara negara atau kelompok yang lebih kecil, namun pada dasarnya merepresentasikan kepentingan kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Menurut *Cambridge University Press* melalui *Cambridge English Dictionary*, *proxy war* dipahami sebagai bentuk perang yang melibatkan pihak-pihak yang bertindak sebagai perwakilan dari kekuatan lain yang lebih besar, yang biasanya juga memberikan dukungan atau bantuan kepada pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.[7]

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas rivalitas Iran dan Arab Saudi dari berbagai perspektif, seperti kajian geopolitik kawasan, konflik sektarian, maupun dinamika keamanan regional. Misalnya, penelitian yang membahas konsep *Middle East Cold War* menyoroti bagaimana persaingan kedua negara berlangsung melalui pengaruh ideologis dan politik di negara-negara lain di kawasan. Penelitian lain juga menyoroti peran konflik proksi dalam memperpanjang ketidakstabilan politik di Timur Tengah. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih berfokus pada aspek strategi geopolitik dan persaingan kekuatan regional, sementara pembahasan mengenai implikasi konflik tersebut terhadap pemenuhan hak-hak warga negara di negara-negara yang terdampak masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak konflik geopolitik regional terhadap pemenuhan hak-hak warga negara menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam perspektif hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Konflik seperti ini umumnya muncul akibat tidak tercapainya kerja sama yang efektif dalam upaya mencapai tujuan bersama, serta adanya bentuk persaingan yang bersifat manipulatif. Ketika kerja sama tidak berjalan dengan baik dan kompetisi berkembang secara tidak sehat, situasi tersebut dapat semakin diperburuk oleh munculnya stereotip negatif antar kelompok. Kondisi ini pada akhirnya mendorong terbentuknya pemisahan sosial antara kelompok yang dianggap sebagai bagian dari "kami" (*ingroup*) dan kelompok yang dipandang sebagai "mereka" (*outgroup*), sehingga memperdalam jarak serta potensi konflik di antara kedua pihak.[8] Konflik ini juga dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif Hubungan Internasional melalui konsep kepentingan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu negara berupaya mempertahankan sekaligus memperluas pengaruh dan kekuasaannya dalam hubungan dengan negara lain. Dalam kerangka tersebut, kepentingan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, diplomasi, serta berbagai kebijakan strategis lain yang diarahkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta aset diplomatik negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, seperti instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi internasional yang relevan dengan konflik di kawasan Timur Tengah. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah berbagai

[6] Susetyorini Peni Prakoso Haidarullah Anggoro, Setiyono Joko, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman)," *Diponegoro Law Journal* 10 (2021): 5–24.
[7] Alvis Rahman Bhasuki et al., "Perang Saudara Di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif Dan Prospek Resolusi Konflik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* IX, no. 1 (2019).
[8] Humairah Arsyad, "Pemetaan Konflik Panjang Arab Saudi Dan Iran," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022): 101, https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.37265.

sumber tersebut untuk memahami hubungan antara konflik geopolitik regional dan pemenuhan hak-hak warga negara di negara yang terdampak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang konflik geopolitik antara Iran dan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah, mengkaji dampak konflik regional tersebut terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, serta menelaah peran negara dalam melindungi warga negaranya di tengah dinamika konflik kawasan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana rivalitas geopolitik regional tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak warga negara di kawasan Timur Tengah.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Konvensi Jenewa 1949, dan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas rivalitas Iran–Arab Saudi, konflik bersenjata, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji dampak rivalitas geopolitik terhadap pemenuhan hak-hak warga negara serta peran negara dalam memberikan perlindungan hukum di tengah konflik regional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Konflik Geopolitik Antara Iran dan Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah

Kawasan Timur Tengah sejak lama dikenal sebagai wilayah yang dipenuhi oleh dinamika geopolitik yang rumit dan melibatkan banyak kepentingan. Di tengah berbagai pihak yang berperan di dalamnya, Iran dan Arab Saudi muncul sebagai dua kekuatan regional yang memiliki pengaruh besar, namun hubungan keduanya kerap diwarnai oleh ketegangan dan persaingan yang terus berlanjut. Persaingan keduanya bukan sekadar persoalan perbatasan atau perselisihan bilateral biasa, melainkan menyentuh lapisan yang jauh lebih dalam yang mencakup perbedaan identitas keagamaan, pertarungan ideologi, perebutan hegemoni regional, serta kepentinan geoekonomi yang masing-masing tidak rela untuk dikompromikan.

Kedua negara ini telah menempatkan diri sebagai aktor utama dalam permaianan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) di Kawasan, dan dalam prosesnya, persaingan ini telah menjadi pemantik berbagai konflik yang meluas jauh melampaui batas wilayah keduanya.[9] Rivalitas politik antara kedua negara ini sebenernya telah berlangsung lebih dari 30 tahun, dan dalam beberapa waktu terakhir justru semakin terasa intens. Masing-masing berupaya memperkuat posisinya di Kawasan demi mengamankan serta memperluas kepentingan politik dan strategisnya.

Akar dari rivalitas ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perpecahan internal umat Islam yang bermula dari persoalan suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perdebatan mengenai siapa yang berhak mewarisi kepemimpinan umat Islam pada akhirnya melahirkan dua arus besar, yaitu kelompok Sunni yang berkembang dan mendominasi hampir seluruh wilayah Arab, dan kelompok Syi'ah yang menemukan pusat kekuatannya di Kawasan Persia yang kini menjadi

[9] Alfin Febrian Basundoro, "PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 1–16.

Iran. Dalam perjalanan sejarahnya, perbedaan teologis ini kemudian menjelma menjadi identitas politik yang mengkristal dan dimanfaatkan oleh berbagai kekuatan sebagai instrumen kekuasaan.[10] Arab Saudi menempatkan dirinya sebagai penjaga dua kota paling suci dalam Islam (Makkah dan Madinah) dan dari posisi itu mengklaim otoritas moral sebagai pemimpin dunia Sunni. Di sisi lain, Iran sejak berabad-abad lampau telah menjadikan Syi'ah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional dan agamanya, sebuah warisan yang akarnya bisa ditelusuri jauh ke masa Dinasti Safawi yang pada abad ke-16 memproklamirkan Syi'ah sebagai mazhab resmi kerajaan Persia.[11] Dua klaim atas keabsahan kepemimpinan dunia Islam yang sama-sama kuat inilah yang menjadi fondasi struktural dari konflik yang terus berlangsung hingga hari ini.

Namun, percikan yang mengubah persaingan laten ini menjadi kontrofrontasi terbuka dan berkelanjutan adaalah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini, Iran bertransformasi secara dramatis dari sebuah monarki pro-Barat menjadi republik teokratis yang secara ideologi anti-hegemoni dan anti-Barat. Lebih dari sekadar perubahan rezim, revolusi ini membawa misi yang ambisius, yaitu mengekspor gagasan revolusionernya ke seluruh penjuru dunia Islam sebagai doktrin yang dikenal dengan nama "Tanshir al-Tsawrah" atau mengekspor revolusi. Doktrin ini dengan cepat mengguncang ketenangan Arab Saudi, karena di tahun yang sama, ribuan warga Arab Saudi khususnya di Provinsi Timur yang berpenduduk mayoritas Syi'ah turun ke jalan menuntut reformasi politik, terinspirasi langsung oleh semangat revolusi Khomeini.[12] Bagi Riyadh, kebangkitan Iran bukan hanya sebuah ancaman ideologis, tetapi ancaman eksistensial terhadap sistem monarki dan stabilitas domestik yang selama ini dipertahankan dengan susah payah. Sejak saat itulah, ketegangan antara kedua negara tidak lagi bisa diredam dan terus mengalami eskalasi dari satu dekade ke dekade berikutnya.[13]

Persaingan ini semakin diperumit oleh dimensi kepentingan geoekonomi yang tidak kalah penting. Iran dan Arab Saudi adalah dua dari produsen minyak terbesar di dunia, dan keduanya kerap berada dalam ketegangan di forum OPEC mengenai kuota produksi dan strategi penetapan harga. Ketika Arab Saudi cenderung menyelaraskan kebijakan energinya dengan kehendak Amerika Serikat termasuk kesediaan menurunkan harga minyak demi kepentingan geopolitik Barat, Iran justru menolak keras pendekatan tersebut sebagai bentuk ketundukan pada hegemoni asing. Di luar forum energi, dimensi geostrategis juga tidak bisa diabaikan. Iran secara geografis menguasai jalur masuk ke Selat Hormuz, sebuah choke point maritim yang dilalui oleh hampir seperlima pasokan minyak dunia. Setiap kali ketegangan memuncak, Tehran tidak jarang mengancam akan menutup selat itu sebagai kartu tekanan terhadap Arab Saudi dan sekutu-sekutunya di Barat. Perebutan pengaruh atas jalur-jalur energi dan posisi geografi strategis ini menambah lapisan konflik yang jauh melampaui sekadar persoalan sektarian.[14]

---

[10] Ihsan Hamid and Ozi Setiadi, "Arab Saudi Dan Iran: Kontestasi Ideologi Dan Dampaknya Di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring," *Politea* 4, no. 1 (2021): 129, https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10453.

[11]Muhammad Yudhi Firmansyah, "Arab Saudi (Sunni) Dan Iran (Syi'ah) Kontemporer: Konflik Atau Persaingan?," *The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 2 (2024): 58–70.

[12] Afini Nurdina Utami, Syaiful Anam, and Ahmad Mubarak Munir, "Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi'ah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran Di Timur Tengah," *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 4, no. 1 (2022): 65–81, https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.111.

[13] Mustahyun Mustahyun, "Rivalitas Arab Saudi Dan Iran Di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016," *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017), https://doi.org/10.18196/jiwp.1105.

[14] Farhad Sarkhosh pour, Ghaffar Zarei, and Amin Revanbod, "The Impact of the Geopolitical Position of the Strait of Hormuz on Iran's Political Economy Challenges in the Persian Gulf," *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 1 (2026): 1–12, https://doi.org/10.61838/kman.isslp.344.

Dari persaingan yang bersifat struktural dan ideologis ini, keduanya kemudian bergerak ke medan pertempuran yang lebih konkret yang dikenal sebagai perang proksi (*proxy war*). Masing-masing mendukung aktor-aktor bersenjata di negara ketiga tanpa harus terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Suriah menjadi salah satu panggung paling nyata dari dinamika ini. Ketika gelombang *Arab Spring* menghantam Suriah pada 2011 dan memicu pemberontakan bersenjata melawan rezim Bashar al-Assad, Arab Saudi segera memberikan dukungan finansial dan militer kepada kelompok-kelompok oposisi yang berupaya menggulingkan pemerintah Damaskus. Sebaliknya, Iran berdiri teguh di belakang rezim Assad karena keselarasan ideologi anti-Barat dan anti-Zionisme yang telah terjalin sejak 1979, sekaligus karena Suriah merupakan jembatan vital bagi Iran untuk menyalurkan pengaruhnya kepada Hizbullah di Lebanon.[15] Konflik Suriah pun bertransformasi dari sebuah pergolakan domestik menjadi medan pertempuran pengaruh dua kekuatan besar Timur Tengah, yang dalam perkembangannya juga menyedot keterlibatan Rusia, Amerika Serikat, dan berbagai aktor global lainnya sehingga semakin sulit untuk diselesaikan.[16]

Eskalasi paling dramatis dalam rentetan ketegangan diplomatik keduanya terjadi pada Januari 2016, ketika Arab Saudi mengeksekusi ulama Syi'ah terkemuka, Syekh Nimr al-Nimr, bersama 46 terpidana lainnya. Eksekusi ini memantik kemarahan luar biasa di Iran, dan massa yang marah menyerbu serta membakar Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Riyadh bereaksi keras dengan memutus hubungan diplomatik sepenuhnya, sebuah langkah yang segera diikuti oleh sejumlah negara sekutu Saudi. Pemutusan hubungan ini tidak hanya menunjukkan terjadinya krisis diplomatik, tetapi juga menggambarkan betapa dalamya perbedaan yang memisahkan kedua negara tersebut. Perbedaan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui langkah atau simbol diplomatik semata, melainkan memerlukan upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang mendasarinya. Para analis menekankan bahwa kejadian ini bukan semata persoalan sektarian, melainkan juga merupakan bagian dari strategi Arab Saudi yang lebih luas untuk menjaga Iran tetap terisolasi secara internasional, terlebih dalam konteks pembicaraan nuklir antara Iran dan kekuatan-kekuatan besar dunia yang berpotensi memulihkan posisi Tehran di panggung global.

Ketegangan yang panjang dan melelahkan itu kemudian menemukan titik balik yang mengejutkan banyak pihak ketika pada Maret 2023, Iran dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang dimediasi oleh Tiongkok.[17] Kedua negara sepakat untuk membuka kembali kedutaan besar masing-masing, yang direalisasikan pada pertengahan tahun yang sama. Langkah ini secara simbolis sangat bermakna dan membawa harapan baru bagi stabilitas Timur Tengah, mengingat dua kutub kekuatan terbesar kawasan itu kembali memiliki jalur komunikasi resmi setelah hampir tujuh tahun terputus. Namun para analis geopolitik mengingatkan bahwa normalisasi tersebut belum bisa disamakan dengan penyelesaian konflik. Perbedaan ideologi yang berakar jauh ke dalam sejarah, persaingan kepentingan regional yang belum selesai, dan berbagai konflik proksi yang

[15] Muhamad Syahdy Maulana, "Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) Dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah Dan Yaman)," *Jurnal Gama Societa* 2, no. 2 (2019): 101, https://doi.org/10.22146/jgs.48867.
[16] Irvan Tasnur and Fitra Widya Wati, "Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik Dibalik Perang Berkepanjangan Di Suriah," *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019), https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.112.
[17] Abdullah Abdullah, "Mediasi Tiongkok Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Iran-Arab Saudi 2023," *Global and Policy Journal of International Relations* 13, no. 01 (2025): 28–40, https://doi.org/10.33005/jgp.v13i01.5095.

masih menyala di beberapa negara membuat rekonsiliasi Iran-Arab Saudi lebih tepat dipahami sebagai manajemen ketegangan jangka pendek daripada perdamaian struktural yang sesungguhnya.[18]

Kawasan Timur Tengah, dengan demikian, masih akan terus diwarnai oleh bayangan panjang dari rivalitas dua kekuatan yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade ini.[19]

**Dampak Konflik Regional Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Negara di Kawasan Timur Tengah**

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami konflik politik, baik konflik antarnegara maupun konflik internal dalam suatu negara. Konflik geopolitik antara Iran dan Arab Saudi merupakan salah satu dinamika politik internasional yang berpengaruh besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.[20] Kedua negara tersebut merupakan aktor penting di kawasan yang memiliki kepentingan strategis untuk memperluas pengaruh politik, ideologi, dan keamanan regional. Persaingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan geopolitik, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan ideologi keagamaan antara kelompok Sunni yang dominan di Arab Saudi dan Syiah yang menjadi basis ideologi politik Iran. Rivalitas tersebut kemudian berkembang menjadi konflik tidak langsung melalui berbagai perang proksi di beberapa negara Timur Tengah seperti Suriah, Yaman, Irak, dan Lebanon.[21]

Kondisi konflik yang berkepanjangan tersebut memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat sipil.[22] Dalam situasi konflik, negara sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi utamanya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Konflik tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan politik, tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik. Akibatnya, berbagai hak dasar masyarakat seperti hak atas keamanan, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, serta hak atas pendidikan menjadi terganggu.[23]

Oleh karena itu, konflik yang dipicu oleh rivalitas geopolitik regional dapat berdampak luas terhadap pemenuhan hak-hak warga negara di negara-negara yang terdampak konflik.

1. Dampak Terhadap Hak Warga Negara atas Keamanan dan Kelangsungan Hidup

   Hak untuk memperoleh keamanan dan perlindungan merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh negara kepada setiap warga negara. Namun, konflik yang terjadi di beberapa negara di kawasan Timur Tengah menyebabkan masyarakat sipil berada dalam

[18]Ahmad Zainal Mustofa, "REKONSILIASI ARAB SAUDI DAN IRAN DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME," *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 253–77.

[19] Safira Nurmalita Sari Hardiansyah Putri, "JurnalTAPIsVol.18No.2Juli—Desember2022p-ISSN:0216-4396JurnalTapis:TeropongAspirasiPolitikIslam18(2)2022e-ISSN:2655-6057https://Ejounal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/TAPIs/Index121PERJALANAN ARAB SAUDI MENUJU DAMAI DENGAN IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULANSI TIMUR " 32, no. 3 (2021): 167–86.

[20] Hemn Shawkat Ali, "Saudi-Iranian Rapprochement and Its Implications for the Security and Stability of the Middle East: A Case Study of Yemen and Syria," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 2 (2023): 26–54, https://doi.org/10.24042/tps.v19i2.17713.

[21] Ida Susilowati, Sheilavia Nur Rizqita, and Rudi Candra, "The Impact of Yemen's Proxy War on Geopolitics in the Middle East 2015-2023," *Journal of Islamic World and Politics* 9, no. 2 (2025): 218–31, https://doi.org/10.18196/jiwp.v9i2.212.

[22] Aura Imelda Azari et al., "Konflik Sosial Kekerasan Bersenjata Dan Keamanan Masyarakat Sipil Di Intan Jaya Papua," *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2026): 125–30, https://doi.org/10.57218/jupeis.vol5.iss1.2347.

[23] Zifa Jesica Fitri and Jihan Inaz Rassel, "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak," *Simbur Cahaya* XXXI, no. 2 (2025): 368–78, https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883.

kondisi yang rentan terhadap kekerasan dan ancaman keselamatan.[24] Dalam konflik bersenjata, masyarakat sipil sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran, tetapi tetap berada di wilayah konflik.

Menurut ketentuan hukum humaniter internasional, masyarakat sipil harus mendapatkan perlindungan khusus selama konflik bersenjata. Prinsip ini telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan bahwa penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan serta harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan selama perang.[25] Namun, dalam praktiknya berbagai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah sering kali menyebabkan masyarakat sipil mengalami ancaman terhadap keselamatan jiwa mereka.

Salah satu contohnya terjadi di Yaman. Konflik di negara tersebut melibatkan kelompok Houthi yang memiliki hubungan dengan Iran dan pemerintah Yaman yang mendapat dukungan dari koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Konflik ini menyebabkan berbagai serangan militer, termasuk serangan udara dan pertempuran darat, yang sering kali berdampak pada masyarakat sipil. Akibatnya, banyak warga sipil menjadi korban kekerasan dan hidup dalam kondisi yang tidak aman.[26]

Selain itu, kondisi serupa juga terjadi di Suriah. Dalam konflik Suriah, Iran memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah, sementara beberapa negara yang bersekutu dengan Arab Saudi memberikan dukungan kepada kelompok oposisi tertentu. Keterlibatan berbagai pihak ini memperpanjang konflik dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap masyarakat sipil. Situasi tersebut membuat warga sipil sulit memperoleh perlindungan keamanan secara maksimal.[27]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak warga negara untuk hidup dengan aman dan terlindungi dari kekerasan. Dengan demikian, konflik yang dipengaruhi rivalitas kedua negara tersebut berdampak pada terganggunya pemenuhan hak masyarakat untuk hidup aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan.

2. Dampak Terhadap Hak Warga Negara atas Tempat Tinggal dan Kehidupan yang Layak

Selain memengaruhi keamanan, konflik juga berdampak pada pemenuhan hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang aman. Kerusakan wilayah permukiman akibat konflik menyebabkan banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal serta terpaksa meninggalkan daerah tempat mereka tinggal sebelumnya. Hak atas tempat tinggal yang layak

[24] Lesza Leonardo Lombok, Angel Christi Singkoh, and Yolanda Salainti, "Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penggunaan Asas Pembedaan Dalam Konflik Di Suriah)," *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2025): 1–15, https://doi.org/10.70358/invention.v2i1.1471.
[25] Maris Ahmed Azzurro Fiza Nabila Sa'idah, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Di Palestina: Studi Kasus Warga Sipil Di Rafah," *KULTURA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 11 (2024): 531–36.
[26] Febriani Amalina Shalihah and Hasan Sidik, "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 Dan Akibatnya Terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan," *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 22–42, https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.100.
[27] Abdulkarim Ekzayez et al., "The Impact of Armed Conflict on Utilisation of Health Services in North-West Syria: An Observational Study," *Conflict and Health* 15, no. 1 (2021): 1–10, https://doi.org/10.1186/s13031-021-00429-7.

menjadi sulit terpenuhi ketika konflik menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pemindahan penduduk secara besar-besaran.[28]

Di Suriah, konflik yang berlangsung sejak tahun 2011 telah menyebabkan jutaan orang kehilangan rumah mereka. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke wilayah lain di dalam negeri maupun ke negara lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Kehilangan tempat tinggal ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, serta akses terhadap pekerjaan.[29]

Situasi serupa juga terjadi di Yaman, di mana pertempuran antara berbagai pihak yang terlibat konflik menyebabkan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting lainnya. Banyak warga yang harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tempat penampungan sementara dengan kondisi yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang dipengaruhi rivalitas geopolitik dapat menghambat pemenuhan hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

3. Dampak Terhadap Hak Warga Negara atas Kesehatan dan Pendidikan

Konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah juga berdampak besar terhadap pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam situasi konflik, fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah sering mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi secara normal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh layanan dasar yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara.

Salah satu contoh dapat dilihat di Yaman, yang mengalami konflik berkepanjangan sejak tahun 2015. Konflik antara kelompok Houthi yang memiliki hubungan dengan Iran dan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah menyebabkan kerusakan pada banyak fasilitas kesehatan. Banyak rumah sakit tidak dapat beroperasi secara maksimal karena kekurangan tenaga medis, obat-obatan, serta kerusakan infrastruktur. Akibatnya, masyarakat sipil mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, sehingga hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan tidak terpenuhi secara optimal.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga terdampak secara signifikan. Banyak sekolah di Yaman mengalami kerusakan akibat konflik atau bahkan digunakan untuk keperluan militer. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan secara normal. Banyak anak-anak terpaksa berhenti sekolah karena kondisi keamanan yang tidak stabil, keterbatasan fasilitas pendidikan, atau karena mereka harus mengungsi bersama keluarga mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya memengaruhi kondisi keamanan masyarakat, tetapi juga menghambat pemenuhan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan.[30]

Situasi serupa juga terjadi di Suriah, di mana konflik yang berlangsung sejak tahun 2011 telah menyebabkan kerusakan pada banyak rumah sakit dan sekolah. Banyak tenaga medis dan tenaga pendidik meninggalkan wilayah konflik karena alasan keamanan. Akibatnya,

[28] Otto Paian Tampubolon, "KAJIAN LITERATUR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KONFLIK BERSENJATA," *JUDGE: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 66–69.
[29] John Knudsen, and Sarah A Tobin*, Chapter Title : The ( Re ) Making of a Palestinian Ghetto : Syrian Displacement and Urban Book Subtitle : Syria ' s Refugees in the Middle East Part II Refugee Urbanism and Urban Policies*, 2024.
[30] Syarif Hidayat, "PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONFLIK BERSENJATA MENURUT ICRC INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI NEGARA YAMAN," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 117–23. Hidayat.

masyarakat sipil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan maupun pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang dipengaruhi oleh rivalitas kekuatan regional turut berdampak pada terganggunya pemenuhan hak dasar warga negara, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

**Peran Negara Dalam Melindungi Warga Negaranya di Tengah Konflik Regional**

Persaingan geopolitik antara Iran dan Arab Saudi sering digambarkan sebagai bentuk "Perang Dingin di kawasan Timur Tengah". Istilah ini digunakan untuk menjelaskan dinamika rivalitas kedua negara yang tidak berlangsung melalui konfrontasi militer secara langsung, tetapi melalui berbagai strategi tidak langsung, seperti penyebaran pengaruh ideologis, pemanfaatan kekuatan ekonomi, serta keterlibatan dalam konflik proksi di sejumlah wilayah. Persaingan tersebut juga dipengaruhi oleh ambisi masing-masing negara untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan dominan di kawasan, yang kemudian semakin dipertegas oleh perbedaan identitas sektarian antara kelompok Syiah yang diasosiasikan dengan Teheran dan kelompok Sunni yang kerap dikaitkan dengan Riyadh. Dalam praktiknya, kedua negara turut memanfaatkan aktor non-negara di beberapa negara berkembang, seperti Yaman, Suriah, dan Lebanon, sebagai sarana untuk memperluas pengaruh geopolitik mereka di tingkat regional.

Di tengah situasi persaingan tersebut, tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya menjadi semakin penting, tetapi sekaligus menghadirkan dilema tersendiri. Secara normatif, negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR.[31] Namun dalam praktik hubungan internasional yang sarat dengan kepentingan strategis dan pertimbangan keamanan, negara sering dihadapkan pada pilihan yang kompleks antara menjaga stabilitas serta kepentingan keamanan nasional (*national security*) dan memastikan perlindungan terhadap keselamatan, kebebasan, serta kesejahteraan individu yang dikenal sebagai konsep keamanan manusia (*human security*).

Negara-negara yang berada dalam pusaran konflik kawasan umumnya menerapkan pendekatan sekuritisasi, yaitu kecenderungan menjadikan berbagai persoalan publik sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan negara. Dalam konteks Iran, ketegangan politik dengan Arab Saudi serta negara-negara Barat sering dimanfaatkan sebagai dasar pembenaran untuk memperketat pengawasan di dalam negeri. Kondisi tersebut berimplikasi pada pembatasan ruang kebebasan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan pendapat dan melakukan kegiatan berkumpul, dengan alasan menjaga stabilitas nasional dari potensi campur tangan pihak asing.

Di sisi lain, Arab Saudi juga mengambil langkah strategis untuk menahan perluasan pengaruh Iran dengan terlibat secara aktif dalam operasi militer di Yaman. Orientasi kebijakan luar negeri yang bersifat konfrontatif tersebut berpotensi menyerap sebagian besar sumber daya negara. Akibatnya, alokasi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi kurang optimal dan tidak sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan warga negara secara merata. Secara nilai kekuatan militer sebagaimana dinyatakan oleh laman Global Firepower, keduanya hampir setara. Nilai kekuatan Iran sebesar 0,2191 dan berada di posisi ke-14 dari 180 negara, sementara Arab Saudi memiliki nilai kekuatan militer sebesar 0,3034 dan berada di posisi

[31] Mohammad Maulana et al., "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAM DI BIDANG EKONOMI , SOCIAL , DAN BUDAYA NATIONAL RESPONSIBILITY IN THE FULFILLMENT OF RIGHTS IN THE ECONOMIC , SOCIAL , AND CULTURAL FIELDS" 1 (2020): 107–29.

ke-17. Dengan usaha perimbangan kekuatan yang masih terus terjadi, menarik untuk mengamati rivalitas kedua negara tersebut.[32]

Pemanfaatan strategi perang proksi dalam rivalitas antara Iran dan Arab Saudi telah memunculkan kondisi ketidakstabilan yang berlangsung secara terus-menerus di kawasan. Situasi ini pada akhirnya membuat batas antara kepentingan keamanan nasional dan ambisi memperluas pengaruh regional menjadi semakin tidak jelas. Bagi Iran, dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti Hezbollah dan Houthi Movement, dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan yang bersifat proaktif untuk menahan pengaruh negara-negara Barat serta membatasi dominasi Arab Saudi di kawasan.

Sebaliknya, Arab Saudi menilai langkah tersebut sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan kedaulatan negaranya. Dampaknya, orientasi kebijakan kedua negara cenderung bergeser dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri menuju penguatan kemampuan militer serta pembiayaan berbagai konflik di luar wilayah nasional. Perubahan prioritas ini secara langsung berpengaruh terhadap distribusi sumber daya negara, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara mereka sendiri.

Situasi Timur Tengah sangat kompleks dan arus rekonsiliasi pun sangat berharga. Sejumlah analis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hasil yang didorong bersama faktor internal dan eksternal. Dilihat dari faktor internal, rakyat Timur Tengah sudah menderita perang dalam jangka waktu yang panjang. Mereka punya keinginan keras terhadap perdamaian. Dilihat dari faktor eksternal beberapa tahun lalu, Amerika Serikat mempercepat pelarian diri dari Timur Tengah dan mengalihkan perhatian serta sumber dayanya ke Asia Pasifik. Sejumlah besar negara-negara Timur Tengah berpendapat bahwa Washington telah membuang komitmen keamanan tradisional kepada negara sekutunya.

Dampak dari rivalitas geopolitik antara Iran dan Arab Saudi juga terlihat pada terganggunya pemenuhan berbagai hak dasar warga negara. Secara umum, terdapat beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat.

Pertama, hak atas keamanan dan kelangsungan hidup. Di wilayah yang menjadi arena konflik proksi, seperti Yaman dan Suriah, kemampuan negara untuk melindungi masyarakat sering kali menjadi sangat terbatas. Persaingan kepentingan antara Iran dan Arab Saudi cenderung memperpanjang berlangsungnya konflik, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak hidup dan keselamatan masyarakat sipil dalam skala besar.

Kedua, hak ekonomi dan sosial. Ketegangan politik di tingkat internasional juga memicu berbagai kebijakan sanksi ekonomi, khususnya terhadap Iran. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan penting, termasuk obat-obatan dan barang kebutuhan pokok. Dalam situasi tersebut, negara menghadapi kesulitan dalam menjamin terpenuhinya standar hidup yang layak, terutama karena sebagian sumber daya negara dialihkan untuk kebutuhan pertahanan dan keterlibatan dalam konflik di luar negeri.

Ketiga, hak sipil dan identitas. Rivalitas antara kedua negara juga memperkuat polarisasi identitas keagamaan antara kelompok Sunni dan Syiah. Pola polarisasi ini kerap dimanfaatkan dalam dinamika politik kawasan, yang pada akhirnya dapat memicu perlakuan tidak setara terhadap kelompok minoritas di dalam negeri masing-masing. Individu atau kelompok yang dianggap memiliki kedekatan ideologis dengan pihak yang dipersepsikan sebagai lawan sering kali menghadapi berbagai bentuk

[32] Mustofa Zahir, "Kebijakan Arab Saudi Melakukan Intervensi Militer Di Yaman Dalam Perspektif Level Analisis Individu," *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 290–303.

pembatasan, baik dalam kesempatan kerja, kebebasan menjalankan keyakinan, maupun partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam konteks rivalitas yang sering dipandang sebagai "Perang Dingin" di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Arab Saudi, negara pada dasarnya memiliki tanggung jawab utama sebagai pihak yang melindungi warganya. Tanggung jawab tersebut dijalankan melalui beberapa tingkat, yaitu pada ranah domestik, hubungan diplomatik, serta kerangka hukum internasional. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah peran penting yang harus dijalankan oleh negara untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap warga negara tetap terjaga di tengah dinamika konflik kawasan.

1. Peran Konstitusional: Menjaga Keseimbangan antara Keamanan Nasional dan Hak Sipil

   Negara berkewajiban memastikan bahwa narasi mengenai adanya ancaman dari luar tidak dijadikan alasan untuk membatasi atau bahkan meniadakan hak-hak sipil masyarakat di dalam negeri. Dalam berbagai konflik proksi, sering muncul kecenderungan sekuritisasi, yaitu proses ketika persoalan sosial dan politik diperlakukan sebagai ancaman keamanan yang bersifat militer. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang kebebasan masyarakat jika tidak diatur secara proporsional.[33] Oleh karena itu, negara perlu menyusun kebijakan hukum yang jelas untuk membedakan antara upaya penegakan hukum terhadap tindakan yang benar-benar mengancam keamanan, seperti kegiatan spionase, dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, negara juga harus menjamin bahwa warga negara, termasuk kelompok minoritas tidak mengalami kriminalisasi hanya karena memiliki latar belakang identitas atau afiliasi sektarian yang dianggap serupa dengan negara yang dipersepsikan sebagai rival. Tanpa adanya batasan hukum yang tegas, fungsi negara sebagai pelindung masyarakat dapat berubah menjadi tindakan yang justru merugikan dan menekan warganya sendiri.
2. Peran Diplomatik: Penyediaan Mekanisme Perlindungan melalui Jalur Tidak Langsung

   Dalam kondisi ketika hubungan diplomatik resmi antara Arab Saudi dan Iran mengalami pemutusan, seperti yang terjadi pada periode 2016–2023, negara tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya di luar negeri. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun tidak terdapat hubungan diplomatik secara formal antara kedua negara. Berdasarkan ketentuan dalam *Vienna Convention on Consular Relations* tahun 1963, suatu negara dapat menunjuk negara lain sebagai *protecting power* atau negara pelindung yang bertugas mewakili kepentingan serta memberikan pelayanan konsuler bagi warga negaranya di wilayah negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya, negara harus memastikan bahwa berbagai bentuk bantuan tetap dapat diberikan kepada warga negara yang berada di luar negeri. Meskipun bersifat administratif dan teknis, fungsi ini memiliki arti yang sangat penting. Apabila negara gagal membangun jalur komunikasi tidak resmi atau *back-channel diplomacy*, maka perlindungan terhadap warga negara di luar negeri dapat terhambat dan berpotensi melanggar hak mereka untuk memperoleh perlindungan diplomatik.
3. Peran Ekonomi: Mengelola Dampak Pilihan antara Belanja Militer dan Kesejahteraan Publik

[33] Teduh Gentar Alam Januar Aditya Pratama, Yasmin Nur Habibah, "Sekuritisasi Pandemi COVID-19 Dan Tatanan Neoliberal: Menuju Deliberalisasi Ekonomi Global?," *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 1–22, https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19670.

Dalam kajian ekonomi politik dikenal konsep yang menggambarkan dilema antara pengeluaran untuk kepentingan militer (*guns*) dan alokasi anggaran bagi kesejahteraan masyarakat (*butter*). Dalam situasi konflik tidak langsung atau perang proksi yang melibatkan Iran dan Arab Saudi, negara sering menghadapi tekanan untuk menyalurkan sumber daya ke berbagai aktivitas keamanan, termasuk dukungan terhadap kelompok atau kepentingan di luar negeri. Kondisi tersebut berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kepentingan domestik. Oleh karena itu, negara perlu melakukan kajian menyeluruh mengenai dampak kebijakan luar negeri terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi, seperti sanksi internasional atau peningkatan pengeluaran militer. Tanggung jawab negara dalam hal ini adalah memastikan bahwa pemenuhan hak ekonomi masyarakat termasuk hak atas standar hidup yang layak tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga agar anggaran untuk sektor-sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan, tidak terpinggirkan akibat prioritas pembiayaan konflik di negara lain, misalnya di Yaman atau Suriah.

Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai aktor non-negara agar aktivitas mereka berlangsung secara bertanggung jawab. Melalui mekanisme pengaturan dan kontrol yang memadai, negara perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar serta standar perlindungan hak asasi manusia (HAM).[34] Oleh karena itu, negara perlu menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama dalam meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik bersenjata terbuka yang berpotensi merusak infrastruktur sipil serta mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran pertahanan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar peningkatan belanja militer tidak mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan Di samping itu, tanggung jawab negara juga mencakup pemberian perlindungan hukum bagi warga negara yang berada di luar negeri, termasuk pekerja migran.[35] Perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat ketidakstabilan ekonomi yang muncul akibat konflik kawasan, seperti yang dipengaruhi oleh dinamika antara Iran dan Arab Saudi. Maka keberhasilan negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi warganya di luar negeri dapat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap warga negara.

## KESIMPULAN

Rivalitas geopolitik antara Iran dan Arab Saudi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Persaingan kedua negara tidak hanya dipicu oleh perbedaan ideologi keagamaan antara Sunni dan Syiah, tetapi juga oleh kepentingan politik, ekonomi, serta upaya memperluas pengaruh regional. Rivalitas tersebut kemudian berkembang dalam bentuk konflik tidak langsung atau perang proksi di beberapa negara seperti Suriah dan Yaman. Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik kawasan, tetapi juga

[34] Farid Wajdi and Imran Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022): 229, https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445.
[35] Humiati Muhammad Maulana Ismail, Yudhia Ismail, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA," *InterdisciplinaryExplorationsinResearch Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 857–79.

menimbulkan konsekuensi serius terhadap kehidupan masyarakat sipil, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti hak atas keamanan, tempat tinggal yang layak, kesehatan, serta pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik regional memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam hubungan antarnegara tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Di tengah situasi tersebut, negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Negara tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, tetapi juga harus tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan perlindungan hak sipil, penguatan diplomasi untuk meredakan konflik, serta pengelolaan sumber daya negara secara bijaksana agar pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat tidak terabaikan. Dengan demikian, perlindungan terhadap warga negara harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh jaminan keamanan, kesejahteraan, dan hak-haknya meskipun berada dalam dinamika konflik geopolitik kawasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Abdullah. “Mediasi Tiongkok Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Iran-Arab Saudi 2023.” *Global and Policy Journal of International Relations* 13, no. 01 (2025): 28–40. https://doi.org/10.33005/jgp.v13i01.5095.

Ali, Hemn Shawkat. “Saudi-Iranian Rapprochement and Its Implications for the Security and Stability of the Middle East: A Case Study of Yemen and Syria.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 2 (2023): 26–54. https://doi.org/10.24042/tps.v19i2.17713.

Arsyad, Humairah. “Pemetaan Konflik Panjang Arab Saudi Dan Iran.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022): 101. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.37265.

Basundoro, Alfin Febrian. “PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK.” *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 1–16.

Bhasuki, Alvis Rahman, John Daniel Chrisvaldo Siahaan, Windy Dermawan, and Akim. “Perang Saudara Di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif Dan Prospek Resolusi Konflik.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* IX, no. 1 (2019).

Ekzayez, Abdulkarim, Yasser Alhaj Ahmad, Hasan Alhaleb, and Francesco Checchi. “The Impact of Armed Conflict on Utilisation of Health Services in North-West Syria: An Observational Study.” *Conflict and Health* 15, no. 1 (2021): 1–10. https://doi.org/10.1186/s13031-021-00429-7.

Firmansyah, Muhammad Yudhi. “Arab Saudi (Sunni) Dan Iran (Syi’ah) Kontemporer: Konflik Atau Persaingan?” *The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 2 (2024): 58–70.

Fitri, Zifa Jesica, and Jihan Inaz Rassel. “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak.” *Simbur Cahaya* XXXI, no. 2 (2025): 368–78. https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883.

Fiza Nabila Sa’idah, Maris Ahmed Azzurro. “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Di Palestina: Studi Kasus Warga Sipil Di Rafah.” *KULTURA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 11 (2024): 531–36.

Hamid, Ihsan, and Ozi Setiadi. “Arab Saudi Dan Iran: Kontestasi Ideologi Dan Dampaknya Di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring.” *Politea* 4, no. 1 (2021): 129. https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10453.

Herlianto, Mohammad Khoiri. "Peran Arab Saudi Dan Iran Pada Konflik Di Yaman Yang Menyebabkan Krisis Kemanusiaan Pada Tahun 2018." Universitas Nasional, 2022.

Hidayat, Arsad, and Sabil Mokodenseho. "Dinamika Arab Sunni Dan Iran Syiah Di Era Kontemporer." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5256–69.

Hidayat, Syarif. "PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONFLIK BERSENJATA MENURUT ICRC INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI NEGARA YAMAN." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 117–23.

Imelda Azari, Aura, Savira Indah Septia Putri, Sylvia Faradiba, Maheswari Raynasywa Rasalhague, Dimas Aditya Hendrayana, Pramudita Aris Widodo, Nabila Auliyaul Haq, and Agus Subianto. "Konflik Sosial Kekerasan Bersenjata Dan Keamanan Masyarakat Sipil Di Intan Jaya Papua." *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2026): 125–30. https://doi.org/10.57218/jupeis.vol5.iss1.2347.

Januar Aditya Pratama, Yasmin Nur Habibah, Teduh Gentar Alam. "Sekuritisasi Pandemi COVID-19 Dan Tatanan Neoliberal: Menuju Deliberalisasi Ekonomi Global?" *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 1–22. https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19670.

Jenderal, Universitas, and Achmad Yani. "DAMPAK KETERLIBATAN IRAN DALAM PROXY WAR YAMAN MELALUI KELOMPOK HOUTHI TERHADAP INSTABILITAS REGIONAL PADA TAHUN 2015-2020." *Global Insight Journal* 02, no. 01 (2025).

Knudsen, John, and Sarah A Tobin. *Chapter Title : The ( Re ) Making of a Palestinian Ghetto : Syrian Displacement and Urban Book Subtitle : Syria ' s Refugees in the Middle East Part II Refugee Urbanism and Urban Policies*, 2024.

Lombok, Lesza Leonardo, Angel Christi Singkoh, and Yolanda Salainti. "Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penggunaan Asas Pembedaan Dalam Konflik Di Suriah)." *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2025): 1–15. https://doi.org/10.70358/invention.v2i1.1471.

Maulana, Mohammad, Yayasan Lembaga, Bantuan Hukum, and Nur Akifah Janur. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAM DI BIDANG EKONOMI , SOCIAL , DAN BUDAYA NATIONAL RESPONSIBILITY IN THE FULFILLMENT OF RIGHTS IN THE ECONOMIC , SOCIAL , AND CULTURAL FIELDS" 1 (2020): 107–29.

Maulana, Muhamad Syahdy. "Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) Dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah Dan Yaman)." *Jurnal Gama Societa* 2, no. 2 (2019): 101. https://doi.org/10.22146/jgs.48867.

Muhammad Maulana Ismail, Yudhia Ismail, Humiati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *InterdisciplinaryExplorationsinResearch Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 857–79.

Mustahyun, Mustahyun. "Rivalitas Arab Saudi Dan Iran Di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016." *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017). https://doi.org/10.18196/jiwp.1105.

Mustofa, Ahmad Zainal. "REKONSILIASI ARAB SAUDI DAN IRAN DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME." *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 253–77.

Prakoso Haidarullah Anggoro, Setiyono Joko, Susetyorini Peni. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman)." *Diponegoro Law Journal* 10 (2021): 5–24.

Putra, Rizki Pratama, Maryam Jamilah, Poppy Irawan, Program Studi, Ilmu Hubungan, Ilmu Politik, and Universitas Andalas. "INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN UNTUK MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI TIMUR TENGAH." *Jurnal PIR* 4, no. 1 (2019): 76–99.

Putri, Safira Nurmalita Sari Hardiansyah. "JurnalTAPIsVol.18No.2Juli—Desember2022p-ISSN:0216-4396JurnalTapis:TeropongAspirasiPolitikIslam18(2)2022e-ISSN:2655-6057https://Ejounal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/TAPIs/Index121PERJALANAN ARAB SAUDI MENUJU DAMAI DENGAN IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULANSI TIMUR " 32, no. 3 (2021): 167–86.

Sarkhosh pour, Farhad, Ghaffar Zarei, and Amin Revanbod. "The Impact of the Geopolitical Position of the Strait of Hormuz on Iran's Political Economy Challenges in the Persian Gulf." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 1 (2026): 1–12. https://doi.org/10.61838/kman.isslp.344.

Shalihah, Febriani Amalina, and Hasan Sidik. "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 Dan Akibatnya Terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan." *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 22–42. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.100.

Susilowati, Ida, Sheilavia Nur Rizqita, and Rudi Candra. "The Impact of Yemen's Proxy War on Geopolitics in the Middle East 2015-2023." *Journal of Islamic World and Politics* 9, no. 2 (2025): 218–31. https://doi.org/10.18196/jiwp.v9i2.212.

Tampubolon, Otto Paian. "KAJIAN LITERATUR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KONFLIK BERSENJATA." *JUDGE: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 66–69.

Tasnur, Irvan, and Fitra Widya Wati. "Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik Dibalik Perang Berkepanjangan Di Suriah." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019). https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.112.

Umam, Khotibul. "Rivalitas Arab Saudi, Iran, Dan Israel Di Kawasan Timur Tengah." *Populika* 10, no. 2 (2022): 1–10. https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509.

Utami, Afini Nurdina, Syaiful Anam, and Ahmad Mubarak Munir. "Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi'ah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran Di Timur Tengah." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 4, no. 1 (2022): 65–81. https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.111.

Wajdi, Farid, and Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022): 229. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445.

Zahir, Mustofa. "Kebijakan Arab Saudi Melakukan Intervensi Militer Di Yaman Dalam Perspektif Level Analisis Individu." *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 290–303.

Abdullah, Abdullah. "Mediasi Tiongkok Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Iran-Arab Saudi 2023." *Global and Policy Journal of International Relations* 13, no. 01 (2025): 28–40. https://doi.org/10.33005/jgp.v13i01.5095.

Ali, Hemn Shawkat. "Saudi-Iranian Rapprochement and Its Implications for the Security and Stability of the Middle East: A Case Study of Yemen and Syria." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 2 (2023): 26–54. https://doi.org/10.24042/tps.v19i2.17713.

Arsyad, Humairah. "Pemetaan Konflik Panjang Arab Saudi Dan Iran." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022): 101. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.37265.

Basundoro, Alfin Febrian. "PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK." *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 1–16.

Bhasuki, Alvis Rahman, John Daniel Chrisvaldo Siahaan, Windy Dermawan, and Akim. "Perang Saudara Di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif Dan Prospek Resolusi Konflik." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* IX, no. 1 (2019).

Ekzayez, Abdulkarim, Yasser Alhaj Ahmad, Hasan Alhaleb, and Francesco Checchi. "The Impact of Armed Conflict on Utilisation of Health Services in North-West Syria: An Observational Study." *Conflict and Health* 15, no. 1 (2021): 1–10. https://doi.org/10.1186/s13031-021-00429-7.

Firmansyah, Muhammad Yudhi. "Arab Saudi (Sunni) Dan Iran (Syi'ah) Kontemporer: Konflik Atau Persaingan?" *The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 2 (2024): 58–70.

Fitri, Zifa Jesica, and Jihan Inaz Rassel. "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak." *Simbur Cahaya* XXXI, no. 2 (2025): 368–78. https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883.

Fiza Nabila Sa'idah, Maris Ahmed Azzurro. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Di Palestina: Studi Kasus Warga Sipil Di Rafah." *KULTURA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 11 (2024): 531–36.

Hamid, Ihsan, and Ozi Setiadi. "Arab Saudi Dan Iran: Kontestasi Ideologi Dan Dampaknya Di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring." *Politea* 4, no. 1 (2021): 129. https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10453.

Herlianto, Mohammad Khoiri. "Peran Arab Saudi Dan Iran Pada Konflik Di Yaman Yang Menyebabkan Krisis Kemanusiaan Pada Tahun 2018." Universitas Nasional, 2022.

Hidayat, Arsad, and Sabil Mokodenseho. "Dinamika Arab Sunni Dan Iran Syiah Di Era Kontemporer." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5256–69.

Hidayat, Syarif. "PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONFLIK BERSENJATA MENURUT ICRC INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI NEGARA YAMAN." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 117–23.

Imelda Azari, Aura, Savira Indah Septia Putri, Sylvia Faradiba, Maheswari Raynasywa Rasalhague, Dimas Aditya Hendrayana, Pramudita Aris Widodo, Nabila Auliyaul Haq, and Agus Subianto. "Konflik Sosial Kekerasan Bersenjata Dan Keamanan Masyarakat Sipil Di Intan Jaya Papua." *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2026): 125–30. https://doi.org/10.57218/jupeis.vol5.iss1.2347.

Januar Aditya Pratama, Yasmin Nur Habibah, Teduh Gentar Alam. "Sekuritisasi Pandemi COVID-19 Dan Tatanan Neoliberal: Menuju Deliberalisasi Ekonomi Global?" *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 1–22. https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19670.

Jenderal, Universitas, and Achmad Yani. "DAMPAK KETERLIBATAN IRAN DALAM PROXY WAR YAMAN MELALUI KELOMPOK HOUTHI TERHADAP INSTABILITAS REGIONAL PADA TAHUN 2015-2020." *Global Insight Journal* 02, no. 01 (2025).

Knudsen, John, and Sarah A Tobin. *Chapter Title : The ( Re ) Making of a Palestinian Ghetto : Syrian Displacement and Urban Book Subtitle : Syria ' s Refugees in the Middle East Part II Refugee Urbanism and Urban Policies*, 2024.

Lombok, Lesza Leonardo, Angel Christi Singkoh, and Yolanda Salainti. "Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penggunaan Asas Pembedaan Dalam Konflik Di Suriah)." *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2025): 1–15. https://doi.org/10.70358/invention.v2i1.1471.

Maulana, Mohammad, Yayasan Lembaga, Bantuan Hukum, and Nur Akifah Janur. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAM DI BIDANG EKONOMI , SOCIAL , DAN BUDAYA NATIONAL RESPONSIBILITY IN THE FULFILLMENT OF RIGHTS IN THE ECONOMIC , SOCIAL , AND CULTURAL FIELDS" 1 (2020): 107–29.

Maulana, Muhamad Syahdy. "Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) Dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah Dan Yaman)." *Jurnal Gama Societa* 2, no. 2 (2019): 101. https://doi.org/10.22146/jgs.48867.

Muhammad Maulana Ismail, Yudhia Ismail, Humiati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *InterdisciplinaryExplorationsinResearch Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 857–79.

Mustahyun, Mustahyun. "Rivalitas Arab Saudi Dan Iran Di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016." *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017). https://doi.org/10.18196/jiwp.1105.

Mustofa, Ahmad Zainal. "REKONSILIASI ARAB SAUDI DAN IRAN DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME." *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 253–77.

Prakoso Haidarullah Anggoro, Setiyono Joko, Susetyorini Peni. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman)." *Diponegoro Law Journal* 10 (2021): 5–24.

Putra, Rizki Pratama, Maryam Jamilah, Poppy Irawan, Program Studi, Ilmu Hubungan, Ilmu Politik, and Universitas Andalas. "INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN UNTUK MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI TIMUR TENGAH." *Jurnal PIR* 4, no. 1 (2019): 76–99.

Putri, Safira Nurmalita Sari Hardiansyah. "JurnalTAPIsVol.18No.2Juli—Desember2022p-ISSN:0216-4396JurnalTapis:TeropongAspirasiPolitikIslam18(2)2022e-ISSN:2655-6057https://Ejounal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/TAPIs/Index121PERJALANAN ARAB SAUDI MENUJU DAMAI DENGAN IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULANSI TIMUR " 32, no. 3 (2021): 167–86.

Sarkhosh pour, Farhad, Ghaffar Zarei, and Amin Revanbod. "The Impact of the Geopolitical Position of the Strait of Hormuz on Iran's Political Economy Challenges in the Persian Gulf." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 1 (2026): 1–12. https://doi.org/10.61838/kman.isslp.344.

Shalihah, Febriani Amalina, and Hasan Sidik. "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 Dan Akibatnya Terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan." *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 22–42. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.100.

Susilowati, Ida, Sheilavia Nur Rizqita, and Rudi Candra. "The Impact of Yemen's Proxy War on Geopolitics in the Middle East 2015-2023." *Journal of Islamic World and Politics* 9, no. 2 (2025): 218–31. https://doi.org/10.18196/jiwp.v9i2.212.

Tampubolon, Otto Paian. "KAJIAN LITERATUR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KONFLIK BERSENJATA." *JUDGE: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 66–69.

Tasnur, Irvan, and Fitra Widya Wati. "Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik Dibalik Perang Berkepanjangan Di Suriah." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019). https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.112.

Umam, Khotibul. "Rivalitas Arab Saudi, Iran, Dan Israel Di Kawasan Timur Tengah." *Populika* 10, no. 2 (2022): 1–10. https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509.

Utami, Afini Nurdina, Syaiful Anam, and Ahmad Mubarak Munir. "Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi'ah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran Di Timur Tengah." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 4, no. 1 (2022): 65–81. https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.111.

Wajdi, Farid, and Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022): 229. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445.

Zahir, Mustofa. "Kebijakan Arab Saudi Melakukan Intervensi Militer Di Yaman Dalam Perspektif Level Analisis Individu." *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 290–303.